

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah melaksanakan desentralisasi yang mana hal ini diawali dengan diterbitkannya UU Otonomi Daerah. Hal ini berimbas pula pada urusan pendidikan, di mana masalah pendidikan diserahkan ke pemerintah daerah. Pusat berfokus pada standar, peraturan, prosedur, dan kebijakan. Sedangkan untuk masalah anggaran, sumber daya manusia, dan aset dibebankan ke pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah provinsi pun hanya sebagai koordinator.

Selama empat tahun dalam pelaksanaan otonomi daerah, dunia pendidikan terlihat memprihatinkan. Di mana sekolah sebagai tempat dalam meningkatkan sumber daya manusia banyak yang kurang perhatian, proses pembelajaran yang kurang kreatif karena berjalan apa adanya, serta banyaknya sarana prasarana sekolah yang tidak berfungsi. Pemerintah kabupaten/kota terindikasi kekurangan anggaran, bahkan ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang hanya memberi anggaran sedikit. Kondisi ini mengakibatkan sekolah memungut biaya dari masyarakat demi terlaksananya proses pembelajaran. Sehingga para wali murid tidak mampu membayar biaya pendidikan, tidak dapat menyekolahkan putra-putrinya. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan nasional yang termaktub di Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana negara berkewajiban untuk setiap warga negaranya.

Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menerbitkan Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah menjamin terlaksananya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pada tahun 2005, pemerintah dan DPR merumuskan penganggaran bantuan operasional sekolah dengan tujuan agar sekolah

dapat beroperasi tanpa membebani masyarakat. Sehingga pada awal Juli 2005, BOS mulai dilaksanakan, walaupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya masih terdapat pelanggaran dan penyimpangan.

Pada tahun 2011, demi meminimalkan pelanggaran dan penyimpangan BOS, mekanisme pengelolaan dana BOS berubah di mana Bantuan Operasional Sekolah dimasukkan keuangan daerah. Pemerintah daerah ikut bertanggung jawab terhadap dana BOS. BOS bernaung di bawah tiga kementerian, yaitu , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas menangani peruntukan atau penggunaan anggaran , Kementerian Dalam Negeri yang mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, dan Kementrian Keuangan yang bertugas menyalurkan anggaran.

Pemerintah mematok anggaran untuk sektor pendidikan 20% dari APBN 2023. Di APBN anggaran pendidikan di tahun ini mencapai 20% dari keseluruhan, namun pemerintah mengatakan bahwa anggaran itu tidak sepenuhnya untuk Kemdikbud. Anggaran tersebut juga untuk kementerian lainnya. Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menargetkan 50 juta siswa dengan anggaran Rp. 612,2 triliun. (<https://wartakota.tribunnews.com>)

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah diatur dalam Permendikbud No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Melalui juknis ini, perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana BOS dijabarkan. Sehingga diharapkan lembaga pendidikan yang menerima dana BOS dapat mengelola dana tersebut tepat sasaran dan transparan. Menurut aturan pengelolaan dana BOS. Dana BOS haruslah digunakan secara efektif. Penggunaan dana BOS haruslah memberi hasil, memberikan pengaruh, dan daya guna bagi sekolah.

Penggunaan Dana BOS yang efektif diharapkan dapat menunjang kinerja pendidik. Pendidik harus terus belajar dan mengembangkan keprofesiannya sehingga menjadi

pendidik yang hebat dan berkualitas yang dapat mewujudkan harapan dan tujuan bangsa Indonesia, yakni menciptakan pembelajaran yang berfokus pada murid dan potensi dan pemikiran mereka. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Mendikbud Nadiem Anwar Makarim bahwa kunci dari cita-cita merdeka belajar adalah para pendidik hebat dan berkualitas, pendidik yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh. pendidik yang mau membuka diri untuk terus belajar dan akan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memberikan hasil yang positif terhadap anak didiknya dan berpengaruh juga terhadap prestasi sekolah.

Penjelasan diatas memberikan gambaran ideal tentang kemajuan kinerja pendidik yang dipengaruhi oleh penggunaan Dana BOS yang efektif. Guslah VIII Kecamatan Pandaan mempunyai 4 lembaga pendidikan sekolah dasar negeri dan 2 sekolah swasta, di mana masing-masing lembaga telah menerima Dana BOS. Idealnya penggunaan Dana BOS yang efektif dapat meningkatkan kinerja guru yang berimbas pada prestasi sekolah, tetapi hal tersebut kurang terlihat.

Persoalan bertambah dengan munculnya rasa tidak puas dari pegawai di beberapa lembaga tentang penggunaan Dana BOS yang kurang efektif dan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang cenderung tertutup, kurang transparan dalam penggunaan Dana BOS, serta kurang berkomunikasi dengan para gurunya. Rasa tidak puas tersebut berdampak pada kinerja para guru menjadi menurun, lebih parah lagi guru tersebut mengajukan mutasi karena merasa tidak cocok bekerja dengan kepala sekolahnya. Jika hal ini berlanjut, bukan tidak mungkin pendidikan di Guslah VIII Kecamatan Pandaan akan terus merosot dan kalah bersaing dengan kecamatan lain.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka peneliti menjadi tertarik untuk meneliti pengaruh efektivitas penggunaan Dana BOS dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD negeri dan swasta se-Guslah VIII Kecamatan Pandaan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar se-guslah VIII Kecamatan Pandaan?
2. Bagaimanakah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar se-guslah VIII Kecamatan Pandaan?
3. Bagaimanakah pengaruh efektivitas penggunaan dana BOS dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar se-guslah VIII Kecamatan Pandaan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan dana BOS terhadap kinerja guru sekolah dasar se-guslah Kecamatan Pandaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar se-guslah Kecamatan Pandaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan dana BOS dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar se-guslah Kecamatan Pandaan

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan memberikan manfaat dalam pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis
 1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan tentang penggunaan dana BOS, gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja guru.

2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penggunaan dana BOS, gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja guru.

b. Manfaat praktis

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penggunaan dana BOS, gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja guru.

2. Bagi sekolah

Sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan dana BOS, penerapan gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan peningkatan kinerja guru.

3. Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan tentang penggunaan dana BOS, gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja guru.

1.5. DEFINISI ISTILAH

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan suatu daya atau keadaan yang dapat menyebabkan hasil atau akibat.

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu tujuan yang diukur dengan hasil yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Penggunaan dana

Penggunaan dana merupakan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya uang yang tersedia.

4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah adalah bantuan pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan strategi atau cara seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dalam menjalankan programnya.

6. Kinerja guru

Kinerja guru merupakan hasil dari kerja yang dapat dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

7. Efektivitas penggunaan Dana BOS

Efektivitas penggunaan dana yaitu keadaan yang menunjukkan tingkat pencapaian atau keberhasilan tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu dalam memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah untuk mendanai belanja non personalia di satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Maka yang dimaksud dengan “Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BOS dan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru sekolah dasar se-Guslah VIII Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ” adalah suatu keadaan dari pemanfaatan Dana BOS yang tepat (sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu) dan cara seorang kepala sekolah dalam memimpin yang berakibat pada capaian hasil kerja guru di sekolah dasar se-Guslah VIII Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.